

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 111*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 113*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahyang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 112*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian , dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-368/PJ/2020 Mengenai Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/Atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ /2017*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2018. *Surat Edaran Nomor 24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli*. Jakarta.